



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERAWATI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 812200

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.590.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 3.886 m2 di KAB / KOTA SINJAI, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1190 m2 di KAB / KOTA SINJAI, WARISAN Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 678 m2 di KAB / KOTA SINJAI, WARISAN Rp. 90.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/82 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
8. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 421 m2/281 m2 di KAB / KOTA SINJAI, WARISAN Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 395.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000



2. MOTOR, HONDA CS-1 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 148.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 355.962.788

F. HARTA LAINNYA Rp. 46.468.927

Sub Total Rp. 3.535.731.715

III. HUTANG Rp. 117.584.730

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.418.146.985

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.